

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 03/KPTS 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELIKAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu ditetapkan Peraturan Desa Melikan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Melikan Tahun Anggaran 2017; |
|  | b. | Bahwa untuk percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Melikan Tahun Anggaran 2017 perlu menunjuk personil untuk melaksanakan tugas tersebut; |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Melikan tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melikan Tahun Anggaran 2017; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dn 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10); |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014- 2019 (Lembaran Desa Melikan Tahun 2014 Nomor 6); |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Melikan Tahun Anggaran 2017: |
|  | 12. | Peraturan Desa melikan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; |
|  |  |  |
| Memutuskan | : |  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Melikan Tahun Anggaran 2017; |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KESATU keputusan ini, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melikan Tahun Anggaran 2017 bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa; |
| KETIGA | : | Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2018 ;  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada tanggal : 4 Januari 2018

 KEPALA DESA MELIKAN

 KARTINA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Rongkop
2. BPD
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 LAMPIRAN

 KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 03/KPTS/2018 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELIKAN TAHUN ANGGARAN 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim | Keterangan |
| 1. | Sri Mulyani | Ketua | Sekretaris Desa |
| 2. | Isdianta | Sekretaris | Kaur Keuangan |
| 3. | Subandiyana | Anggota | Kaur TU |
| 4. | Endang Sumpeni | Anggota | Kaur Perencanaan |
| 5. | Joko Suripno | Anggota | Kasi Pemerintahan |
| 6. | Suprapto | Anggota | Kasi Kesejahteraan |
| 7. | Rakijan | Anggota | Kasi Pelayanan |
| 8. | Sulasmi | Anggota | Ketua PKK Desa |
| 9. | Giranta | Anggota | Ketua LPMD |
| 10. | Edi Prayitna | Anggota | KPMD |
| 11. | Aris Priyanto | Anggota | Staf Pemerintah Desa |

 KEPALA DESA MELIKAN

 KARTINA



**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 01/KPTS/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PTPKD, BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DAN PENGURUS BARANG**

**DESA MELIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DESA MELIKAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Melikan Tahun anggaran 2017, perlu menunjuk Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang; |
|  | b.  | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Melikan tentang Penunjukan Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pengurus Barang di Desa Melikan Tahun Anggaran 2017; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dn 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10); |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014- 2019 (Lembaran Desa Melikan Tahun 2014 Nomor 6); |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Melikan Tahun Anggaran 2017: |
|  | 12. | Peraturan Desa Melikan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Melikan (Lembaran Desa Melikan Tahun 2017 Nomor 01) |
|  | 13. | Peraturan Desa Melikan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Melikan (Lembaran Desa Melikan Tahun 2017 Nomor 02); |
|  | 14. | Peraturan Desa Melikan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. |
|  |  |  |
| Memutuskan | : |  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang Desa Melikan Tahun Anggaran 2017; |
| KEDUA | : | Tugas Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini : |
|  |  | 1. Koordinator PTPKD :
 |
|  |  | 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 |
|  |  | 1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 |
|  |  | 1. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 |
|  |  | 1. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 |
|  |  | 1. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluarana APBDesa.
 |
|  |  | 1. Bendahara Desa :
 |
|  |  | Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; |
|  |  | 1. Pembantu Bendahara :
 |
|  |  | Membantu pembukuan keuangan bendahara Desa; |
|  |  | 1. Pengurus Barang :
 |
|  |  | Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan barang milik Desa; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada tanggal : 02 Januari 2017

 KEPALA DESA MELIKAN

 **KARTINA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Rongkop
2. Arsip
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

 LAMPIRAN

 KEPUTUSAN KEPALA DESA

 NOMOR 1 TAHUN 2017

 TENTANG

 PENUNJUKAN KOORDINATOR

 PTPKD, BENDAHARA DESA,

 PEMBANTU BENDAHARA, DAN

 PENGURUS BARANG

 DESA MELIKAN

 TAHUN ANGGARAN 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA** | **Jabatan Dalam Dinas** | **Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa** |
| 1. | Sri Mulyani,S.Pd. | Sekretaris Desa | Koordinator PTPKD |
| 2. | Subandiyana | Kaur Umum | Bendahara Desa |
| 3. | Isdianta | Staf | Pembantu Bendahara |
| 4. | Endang Sumpeni | Kaur Perencanaan | Pengurus Barang |

|  |
| --- |
| KEPALA DESA MELIKAN**KARTINA** |

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KECAMATAN RONGKOP**

**DESA MELIKAN**

***Alamat : Ngricik RT. 01/ 06, Melikan Rongkop, Gunungkidul Kode POS : 55883***

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR......TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DESA MELIKAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Melikan Tahun anggaran 2016, perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan; |
|  | b. | Bahwa dalam pelaksanaannya, pelaksana kegiatan yang purna tugas perlu diganti personel dalam melanjutkan tugasnya; |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Melikan tentang perubahan atas Keputusan Kepala Desa Melikan Nomor 13 tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan di Desa Melikan Tahun Anggaran 2016 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dn 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10); |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014- 2019 (Lembaran Desa Melikan Tahun 2014 Nomor 6); |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Melikan Tahun Anggaran 2016: |
|  | 12. | Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. |
|  |  |  |
| Memutuskan | : |  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tugas Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah : |
|  |  | 1. Menyiapkan dan melkasanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 |
|  |  | 1. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa dan dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 |
|  |  | 1. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 |
|  |  | 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 |
|  |  | 1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 |
|  |  | 1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakantugasnya sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa;  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada tanggal : Oktober 2016

 KEPALA DESA MELIKAN

 **KARTINA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Rongkop
2. Arsip
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

 LAMPIRAN

 KEPUTUSAN KEPALA DESA

 NOMOR 13 TAHUN 2016

 TENTANG

 PENUNJUKAN PELAKSANA

 KEGIATAN PENGELOLAAN

 KEUANGAN DESA

 TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama/ Jabatan | Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan | Pagu Anggaran(Rp.) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| **1** | **ENDANG**  | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat |  |
|  | **SUMPENI** | 2 | Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  |
| Kaur Perencanaan | 3 | Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional |  |
|  |  | 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  |
|  |  | 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  |
|  |  | 6 | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknik Perkantoran |  |
|  |  | 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  |
|  |  | 8 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi nke Luar Daerah |  |
|  |  | 9 | Makan dan minum rapat koordinasi |  |
|  |  | 10 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor |  |
|  |  | 11 | Penyediaan peralatan rumah tangga |  |
|  |  | 12 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor |  |
|  |  | 13 | Pengadaan peralatan kerja |  |
|  |  | 14 | Pembangunan balai desa ( pagar dan halaman) |  |
|  |  | 15 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional |  |
|  |  | 16 | Pemeliharaan rutin/berkala Balai Desa |  |
|  |  | 17 | Operasional LPMD |  |
|  |  | 18 | Operasional Karang Taruna |  |
|  |  | 19 | Pengadaan seragam/ pakaian dinas |  |
|  |  | 20 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  |
|  |  | 21 | Penyusunan profil Desa |  |
|  |  | 22 | Penyelenggaraan Musrenbang Desa |  |
|  |  | 23 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa |  |
|  |  | 24 | Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ SPJ dan Semesteran |  |
|  |  | 25 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa |  |
|  |  | 26 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Desa |  |
|  |  | 27 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | SUBANDIYANA | 1 | Pembangunan gedung baru Kantor Desa (Lantai 2) |  |
|  | Kaur Umum | 2 | Penghasilan tetap da Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa |  |
|  |  | 3 | Tunjangan dan Operasional BPD |  |
|  |  | 4 | Operasional RT/RW |  |
|  |  | 5 | Penyusunan monografi Desa |  |
|  |  | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa |  |
|  |  | 7 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa |  |
|  |  | 8 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa |  |
|  |  | 9 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB-P2 |  |
|  |  | 10 | Pengisian Perangkat Desa |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | SUPRAPTO | 1 | Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman |  |
|  | Kabag Pemb | 2 | Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong jalan Desa |  |
|  |  | 3 | Pembanguna saluran drainase/ gorong-gorong |  |
|  |  | 4 | Rehabilitasi / Pemeliharaan turap/ talud/ bronjong jalan desa |  |
|  |  | 5 | Pembangunan Jalan Usaha Tani |  |
|  |  | 6 | Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa |  |
|  |  | 7 | Pelatihan keterampilan Ekonomi Produktif |  |
|  |  | 8 | Pelatihan Aparatur pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan Desa |  |
|  |  | 9 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | SUPRIYONO | 1 | Operasional PKK |  |
|  | Kaur Keuangan | 2 | Insentif Pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD |  |
|  |  | 3 | Pelaksanaan kursus/pelatihan keterampilan untuk masyarakat |  |
|  |  | 4 | Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif |  |
|  |  | 5 | Pemberian makan atambahan untuk balita |  |
|  |  | 6 | Pembinaan kader kesehatan/ KB |  |
|  |  | 7 | Pengembangan Desa Siaga |  |
|  |  | 8 | Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) |  |
|  |  | 9 | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera |  |
|  |  | 10 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional |  |
|  |  | 11 | Pengadaan sarana dan prasarana Olah Raga |  |
|  |  | 12 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Lapangan Olah Raga |  |
|  |  | 13 | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) |  |
|  |  | 14 | Pelaksanaan Upacara Adat Daerah |  |
|  |  | 15 | Pembinaan dan pengembangan Seni Budaya Daerah |  |
|  |  | 16 | Pelaksanaan gelar seni budaya Daerah |  |
|  |  | 17 | Pengembangan kehidupan Sosial Keagamaan |  |
|  |  | 18 | Pembinaan LPMD |  |
|  |  | 19 | Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong |  |
|  |  | 20 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat |  |
|  |  | 21 | Pelaksanaan Evaluasi / Perlombaan Desa |  |

 KEPALA DESA MELIKAN

 **KARTINA**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KECAMATAN RONGKOP**

**DESA MELIKAN**

***Alamat : Ngricik RT. 01/ 06, Melikan Rongkop, Gunungkidul Kode POS : 55883***

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR......TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PTPKD, BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DAN PENGURUS BARANG**

**DESA MELIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DESA MELIKAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Melikan Tahun anggaran 2016, perlu menunjuk Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang; |
|  | b. | Bahwa sehubungan adanya susunan perangkat desa yang baru, maka perlu melakukan perubahan penunjukan Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pengurus Barang yang baru; |
|  | c.  | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Melikan tentang Penunjukan Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pengurus Barang di Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dn 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10); |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014- 2019 (Lembaran Desa Melikan Tahun 2014 Nomor 6); |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Melikan Tahun Anggaran 2016: |
|  | 12. | Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. |
|  |  |  |
|  | : |  MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
| KEDUA | : | Tugas Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini : |
|  |  | 1. Koordinator PTPKD :
 |
|  |  | 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 |
|  |  | 1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 |
|  |  | 1. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 |
|  |  | 1. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 |
|  |  | 1. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluarana APBDesa.
 |
|  |  | 1. Bendahara Desa :
 |
|  |  | Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; |
|  |  | 1. Pembantu Bendahara :
 |
|  |  | Membantu pembukuan keuangan bendahara Desa; |
|  |  | 1. Pengurus Barang :
 |
|  |  | Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan barang milik Desa; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, Koordinator PTPKD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada tanggal : Oktober 2016

 KEPALA DESA MELIKAN

 **KARTINA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Rongkop
2. Arsip
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 LAMPIRAN

 KEPUTUSAN KEPALA DESA

 NOMOR 1 TAHUN 2016

 TENTANG

 PENUNJUKAN KOORDINATOR

 PTPKD, BENDAHARA DESA,

 PEMBANTU BENDAHARA, DAN

 PENGURUS BARANG

 DESA MELIKAN

 TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA** | **Jabatan Dalam Dinas** | **Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa** |
| 1. | Sri Mulyani,S.Pd. | Sekretaris Desa | Koordinator PTPKD |
| 2. | Subandiyana | Kaur Umum | Bendahara Desa |
| 3. | Isdianta | Staf | Pembantu Bendahara |
| 4. | Suharno | Staf | Pengurus Barang |

|  |
| --- |
| KEPALA DESA MELIKAN**KARTINA** |



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM DESA SIAGA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERIODE TAHUN 2013- 2019

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran Masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dan perilaku hidup bersih dan sehat; |
|  | b. | Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta Masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya di tingkat Desa perlu adanya Forum Desa Siaga sebagai wadah Integrasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat di tingkat Desa; |
|  | c.  | Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Pengurus Forum Desa Siaga di Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
|  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; |
|  | 7. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; |
|  | 8. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014- 2019; |
|  | 9. | Peraturan Desa Melikan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Membentuk pengurus Forum Desa Siaga Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tugas dari pengurus Forum Desa Siaga Desa Melikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini antara lain : |
|  |  | 1. Menyelenggarakan Program Desa Siaga antara lain :
 |
|  |  | 1. Upaya penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) atau dana sehat;
 |
|  |  | 1. Survailans dan penanggulangan penyakit adalah membantu Ketua Koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan, pendataan serta pelaporan kondisi Masyarakat secara komprehensif;
 |
|  |  | 1. Mendorong peningkatan PHBS dan KADARZI;
 |
|  |  | 1. Pengembangan Posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 |
|  |  | 1. Penyelenggaraan pengembangan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) serta penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana;
 |
|  |  | 1. Pembinaan dan penanganan kesehatan sosial Masyarakat, lingkungan pemukiman yang sehat, STBM, lalu lintas dan layanan transportasi sehat, dan perkantoran sehat;
 |
|  |  | 1. Koordinasi dan mendorong ketersediaan dan pendistribusian pangan untuk ketahanan pangan, seta penanganan masalah gizi masyarakat, serta pemberdayaan industri rumah tangga.
 |
|  |  | 1. Menyelenggarakan Pos Kesehatan Desa /Sekretariat Posko Kesehatan Desa Siaga;
 |
|  |  | 1. Memberdayakan potensi Masyarakat untuk mewujudkan Desa Siaga yang Mandiri;
 |
|  |  | 1. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan satuan tugas Forum Desa Siaga;
 |
|  |  | 1. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan;
 |
|  |  | 1. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Padukuhan Siaga.
 |
| KEEMPAT | : | Masa bakti pengurus Desa Siaga selam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini; |
| KELIMA | : | Pembiayaan yang muncul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah; |
| KEENAM | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; |
| KETUJUH | : | Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14/KPTS/2012 tentang pembentukan Pengurus Desa Siaga Desa Melikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan  | : Melikan |
| Pada tanggal | : 26 November 2015 |
| Kepala Desa |
| **KARTINA** |

 Lampiran Keputusan Kepala Desa Melikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor  | : | 9 /KPTS/2013 |
| Tentang | : | Penetapan Pengurus Forum Desa Siaga Desa Melikan Kecamatan Periode Tahun 2013-2019 |

SUSUNAN PENGURUS FORUM DESA SIAGA

DESA MELIKAN PERIODE 2013-2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | STRUKTUR | NAMA | ALAMAT | UNSUR |
| 1. | Penanggungjawab | Kartina | Kendal | Kepala Desa |
| 2. | Ketua | Rakijan | Gebangwetan | Kabag Kesra |
| 3. | Wakil Ketua I | Sulasmi | Kendal | Ket TP PKK |
| 4. | Wakil Ketua II | Giranto | Ngricik | LPMD |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Sekretaris I | Endriyani | Songwaluh | TP PKK |
| 6. | Sekretaris II | Fitria Wuri W. | Ngricik | TP PKK |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Bendahara I | Endang Sumpeni | Jerukgulung | Kaur Perenc. |
| 8. | Bendahara II | Dwi Utami | Songwaluh | Kader |
|  |  |  |  |  |
|  | SATUAN TUGAS : |  |  |  |
|  | 1. Poskesdes/ Yankes
 |  |  |  |
| 9. | * Koor dinator
 | Sulistiyanto | Songwaluh | Dukuh |
| 10. | * Anggota
 | Sutarman | Wuni | Dukuh |
| 11. |  | Yulianto | Ngricik | Dukuh |
| 12. |  | Sri Mulyani,S.Pd. | Jerukgulung | Kader |
| 13. |  | Harini,S.Pd. | Mujing | Kader |
|  | 1. DBD,TBC,HIV,AIDS
 |  |  |  |
|  | Surveilans & Penanggulangan |  |  |  |
| 14. | * Koordinator
 | Sumarno | Melikan | Dukuh |
| 15. | * Anggota
 | Yuni Riawati | Melikan | Kader |
| 16. |  | Agus Sumarno | Gebangkulon | Dukuh |
| 17. |  | Basuki | Jerukgulung | Dukuh |
| 18. |  | Nur Budiyani | Tambak | Kader |
|  | 1. PHBS % KADARSI
 |  |  |  |
| 19. | * Koordinator I
 | Suyatni | Jerukgulung | Kader |
| 20. | * Koordinator II
 | Umiyati | Ngricik | Kader |
| 21. | * Anggota
 | Sumirah | Jerukgulung | TP PKK |
| 22. |  | Sutarti | Melikan | TP PKK |
| 23. |  | Triyatmi | Kembang | Kader |
| 24. |  | Sugiyarti | Dondong | TP PKK |
| 25. |  | Paryati | Kendal | TP PKK |
|  | 1. Pengembangan Posyandu & UKBM
 |  |  |  |
| 26. | * Koordinator
 | Ika Rahayu N. | Gebangkulon | TP PKK |
| 27. | * Anggota
 | Puji Riyanti | Mujing | Kader |
| 28. |  | Marinem | Gebangwetan | TP PKK |
| 29. |  | Muji Astuti | Wuni | TP PKK |
| 30. |  | Sunarmi | Kembang | Kader |
|  | 1. GSI, kegawatdaruratan kesehatan dan Bencana
 |  |  |  |
| 31. | * Koordinator
 | Nur Faizah | Tambak | TP PKK |
| 32. | * Anggota
 | Edi Prayitno | Jerukgulung | KR Taruna |
| 33. |  | Dwiyono | Mujing | KR Taruna |
| 34. |  | Sukijan | Dondong | Dukuh |
| 35. |  | Isnadi Riyanto | Tambak | Dukuh |
|  | 1. Pengembangan Ekonomi
 |  |  |  |
| 36. | * Koordinator
 | Lestari | Ngricik | TP PKK |
| 37. | * Anggota
 | Suwardi | Kendal | Dukuh |
| 38. |  | Sudaroh | Gebangwetan | Dukuh |
| 39. |  | Sanusi | Kembang | Dukuh |
| 40 |  | Kasini | Kendal | Kader |
|  | 1. Lingkungan Sehat dan STBM
 |  |  |  |
| 41. | * Koordinator
 | Suratmi,S.Pd. | Tambak | TP PKK |
| 42. | * Anggota
 | Hernik | Jerukgulung | Kader |
| 43. |  | Anik Wahyuni | Wuni | Kader |
| 44. |  | Eni Lestari | Ngricik | Ngricik |
| 45. |  | Rusdiyanti | Gebangkulon | Kader |
| 46. |  | Nurmiyati | Ngampiran | TP PKK |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : 05 Desember 2013

|  |
| --- |
| Kepala Desa**KARTINA** |



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 27/KPTS/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENGGUNAAN SURPLUS DANA UPK TAHUN 2016

UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN TERNAK KAMBING

DESA MELIKAN

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan bantuan keuangan yang bersumber dari surplus dana UPK “Laksita Danamas” tahun 2016 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan; |
|  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Melikan tentan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Surplus Dana UPK “Laksita Danamas” Tahun 2014 untuk Desa Melikan |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Ppemerintah Nomor 32 tahun 1950; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
|  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 7. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Surplus Dana UPK “Laksita Danamas” Tahun 2016 untuk Desa Melikan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tugas pokok Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah : |
|  |  | 1. Menyusun Proposal penggunaan dana berikut rincian rencana anggaran biaya;
 |
|  |  | 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 |
|  |  | 1. Mempertanggungjawabkan pengeluaran/belanja yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 |
|  |  | 1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Melikan;
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia harus memperhatikan dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi dari UPK “Laksita Danamas” dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Melikan; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

|  |
| --- |
| Kepala Desa**KARTINA** |

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

NOMOR 27/KPTS/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN SURPLUS DANA UPK “LAKSITA DANAMAS”

TAHUN 2016 UNTUK DESA MELIKAN

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PENANGGUNGJAWAB | : | KARTINA | Kepala Desa |
| KETUA | : | RAKIJAN | Kabag Kesra |
| SEKRETARIS | : | SULISTIYANTO | Dukuh Songwaluh |
| BENDAHARA | : | SUYATNO | LPMD |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

|  |
| --- |
| Kepala Desa**KARTINA** |



**PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN**

**KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA SEHAT/ DANA SOSIAL DI DESA MELIKAN**

**PEMERINTAHAN DESA MELIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MELIKAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta lualitas lingkungan fisik, sosial dan perilaku hidup bersih dan sehat; |
|  | b. | Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa diperlukan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative dengan didukung partisipasi masyarakat untuk mandiri dalam bidang kesehatan; |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan dana sehat / Dana Sosial di Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  | 7. | Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; |
|  | 8. | Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat; |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa; |
|  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; |
|  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; |
|  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; |
|  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  | 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Desa di Posyandu; |
|  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Operasional Posyandu; |
|  | 16. | SK Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga; |
|  | 17. | Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan Desa / Kelurahan Siaga Aktif; |
|  | 18. | Surat Keputusan Kepala Desa Melikan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga di Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul; |
|  |  |  |
|  |  |  MEMUTUSKAN |
|  |  |  |
| Menetapkan | :  | PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN DANA SEHAT / DANA SOSIAL DI DESA MELIKAN |

|  |
| --- |
| **BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Melikan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Melikan.
3. Dukuh adalah Perangkat Desa di tingkat Padukuhan di wilayah Desa Melikan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Melikan.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adala Perangkat Desa Melikan yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dususn/ Dukuh.
9. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknyan memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
10. Penggerak dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
11. Toma adalah Tokoh Masyarakat yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumebr daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga serta UKBM
12. Kader adalah relawan Desa Siaga yang berasal para kader DESA SIAGA dan Berperan dalam pelaksanaan Desa Siaga yang melalui kegiatan UKBM.
13. Tabulin adalah Tabungan Ibu Bersalin yang dikumpulkan warga dan dikembalikan untuk kebutuhan sosial yang disepakati warga bersangkutan dengan prioritas untuk persalinan ibu hamil dari keluarga miskin.
14. Dasolin adalah Dana Sosial Bersalin yang dikumpulkan warga dan dikembalikan untuk kebutuhan sosial yang disepakati warga bersangkutan dengan prioritas untuk persalinan ibu hamil dari keluarga miskin.
15. Musyawarah masyarakat Desa (MMD) dalam Desa Siaga adalah Musyawarah Masyarakat Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Desa/Padukuhan beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survei mawas diri atau kegiatan surveilan untuk merencanakan program kegiatan penanggulangan masalah kesehatan.

**BAB II****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**Maksud Pengelolaan Dana Sehat/Dana Sosial adalah untuk melakukan pengelolaan dana sehat/dana sosial yang dikumpulkan oleh warga masyarakat untulk membantu pembiayaaan bidang kesehatan dan sosial masyarakat di wilayahnya secara mandiri.**Pasal 3**Tujuan dari Pengelolaan Dana Sehat/ Dana Sosial adalah meliputi :1. Membantu pembiayaan kesehatan masyarakat.
2. Membantu pembiayaan sosial kemasyarakatan.
3. Menumbuhkan rasa gotong royong di masyarakat.
4. Terkoordinasikannya kegiatan- kegiatan terkait dengan pembangunan derajat kesehatan masyarakat desa.
5. Terciptanya partisipasi masyarakat dengan semangat kebersamaan dan swadaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.
6. Adanya prgram kesehatan masyarakat desa yang sistemik, terencana, terarah dan efektif.

**BAB III****PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN** **DANA SEHAT / DANA SOSIAL****Pasal 4**1. Pengumpulan dana sehat/ dana sosial dilakukan oleh pengurus lembaga desa/ padukuhan menyesuaikan dengan kesepakatan warga setempat.
2. Mekanisme pengumpulan dana sehat / dana sosial berdasarkan kesepakatan warga masyarakat tingkat padukuhan.
3. Besarnya jumlah dana sehat/ dana sosial yang dikumpulkan dan waktu pengumpulannya sesuai dengan kesepakatan warga di masing-masing wilayah administratif (RT/RW/Padukuhan) berdasarkan hasil Musyawarah Masyarakat Padukuhan / RT/RW.

**Pasal 5**1. Pengelolaan dana sehat/ dana sosial dilakukan oleh Pengurus lembaga yang ada di masing-masing wilayah Padukuhan/RT/RW berdasarkan kesepakatan warga.
2. Pengelolaan dana sehat/dana sosial dilakukan administrasi pencatatan dan pelaporan secara rutin berdsarka hasil kesepakatan warga.

**Pasal 6**1. Pemanfaatan dana sehat/ dana sosial digunakan untuk membantu pembiayaan kesehtana sosial dengan jenis kegiatan sesuai dengan kesepakatan warga berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
2. Besarnya dana bantuan untuk biaya kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan kesepakatan warga berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

**BAB IV****TUGAS PENGELOLA DANA SEHAT/DANA SOSIAL****Pasal 7**Adapun tugas Pengelola Dana Sehat meliputi :1. Mengumpulkan dana sehat/ dana sosial.
2. Melakukan pembukuan/administrasi dana sehat/ dana sosial.
3. Membuat laporan secara berkala.
4. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Padukuhan Siaga dan Desa Siaga.

**BAB V****JENIS DANA SEHAT/DANA SOSIAL****Pasal 8**Jenis dana sehat/ dana sosial meliputi :1. Tabulin (tabungan ibu bersalin) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di Bank, di Koordinator kader atau di Bidan Desa, pengurus lembaga padukuhan (pengurus RT/RW/Karangtaruna) yang akan membantu persalinan, selain berbentuk uang ada juga simpanan ibu hamil yang berbentuk innatura misalnya kambing, perhiasan, dan sebagainya, yang ketika waktunya tiba siap untuk dijual dan hasilnya untuk membiayai persalinan.
2. Dana sehat adalah uang yang dikumpulkan oleh anggota masyarakat dan dikumpulkan oleh pengurus Posyandu, pengurus lembaga padukuhan (Pengurus RT/RW/Karangtaruna) yang akan membantu biaya kesehatan secara mandiri bagi warga yang menderita sakit dan opname di fasilitas kesehatan.
3. Dana sosial adalah uang yang yang dikumpulkan oleh anggota masyarakat dan dikumpulkan oleh pengurus Posyandu, pengurus lembaga padukuhan(pengurus RT/RW/Karangtaruna) yang akan membantu biaya sosial secara mandiri bagi warga yang mengalami masalah sosial seperti kematian, kegiatan sosial dan lain-lain.

**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.**Pasal 10**Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di : MelikanPada tanggal : 23 November 2015 |
| KEPALA DESA MELIKAN**KARTINA** |

Diundangkan dalam lembaran Desa Melikan Kecamatan Rongkop

Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015

|  |
| --- |
| SEKRETARIS DESA MELIKAN**RAKIJAN** |



**PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN**

**KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DESA SIAGA**

**PEMERINTAHAN DESA MELIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MELIKAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat perlu adanya pemberdayaan masyarakat; |
|  | b. | Bahwa dalam rangka mengembangkan pemberdayaan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat Desa perlu adanya forum Desa Siaga sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat desa; |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengembangan Desa Siaga di Desa Melikan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul; |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44); |
|  | 2. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
|  | 4. | Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dn 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |
|  | 6. | Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; |
|  | 7. | Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat; |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa; |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; |
|  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; |
|  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Desa di Posyandu; |
|  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Operasional Posyandu; |
|  | 13. | SK Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga; |
|  | 14. | Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan Desa / Kelurahan Siaga Aktif; |
|  | 15. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gununkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 36 Seri E); |
|  | 17. | Peraturan Desa Melikan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melikan Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Melikan Nomor 06); |
|  | 18. | Peraturan Desa Melikan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Melikan (APBDesa) |
|  |  |  |
|  |  | **MEMUTUSKAN** |
|  |  |  |
| Menetapkan | :  | PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN TENTANG PENGEMBANGAN DESA SIAGA DI DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL |

|  |
| --- |
| **BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Melikan.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Melikan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawarata Desa Melikan.
6. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
7. Perangkat Desa adala perangkat Desa Melikan yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun/ Dukuh.
8. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknyan memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
9. Penggerak dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
10. Tokoh Masyarakat yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumebr daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga serta UKBM.
11. Kader adalah relawan Desa Siaga yang berasal para kader DESA SIAGA dan Berperan dalam pelaksanaan Desa Siaga yang melalui kegiatan UKBM.
12. Tabungan Ibu Bersalin yang selanjutnya disebut Tabulin yang dikumpulkan warga dan dikembalikan untuk kebutuhan sosial yang disepakati warga bersangkutan dengan prioritas untuk persalinan ibu hamil dari keluarga miskin.
13. Dana Sehat adalah Dana Sosial Kesehatan yang dikumpulkan warga dan dikembalikan untuk kebutuhan sosial yang disepakati warga bersangkutan dengan prioritas untuk persalinan ibu hamil dari keluarga miskin.
14. Perilaku Hidup Bersi dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
15. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bawah koordinasi Perangkat Desa.
16. Survei Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah kegiatan surveilan, pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat Desa di bawah bimbingan petugas kesehatan di Desa atau Bidan Pembina atau Bidan Desa Domisili.
17. Musyawarah Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat MMD dalam Desa Siaga adalah pertemuan perwakiloan warga Desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survei mawas diri atau kegiatan surveilan untuk merencanakan program kegiatan penanggulangan masalah kesehatan.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah pengurus forum desa siaga dan atau anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan, kemauan untuk menggerakkan dan mendampingi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan partisipatif.

**BAB II****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**Maksud Pengembangan Desa Siaga adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan dan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana di wilayahnya secara mandiri.**Pasal 3**Tujuan dari Pembentukan pengurus Forum Desa Siaga adalah meliputi :1. Adanya akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan tepat bagi masyarakat.
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan derajat kesehatan masyarakat desa.
3. Terciptanya partisipasi masyarakat dengan semangat kebersamaan dan swadaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.
4. Adanya program kesehatan masyarakat desa yang sistemik, terencana, terarah dan efektis.

**BAB III****PENGEMBANGAN FORUM DESA SIAGA****Pasal 4**1. Pengembangan Forum Desa Siaga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
2. MMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa dan Fasilitator Desa Siaga dan petugas kesehatan.
3. Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pimpinan dan Anggota LPM, Dukuh, Pengurus Desa Siaga dan Kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan Pengurus RT dan RW.

**Pasal 5**1. Pengurus Forum Desa Siaga terdiri dari Penganggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Satuan Tugas.
2. Pengurus sebgaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
3. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
4. Ketua dari unsur Perangkat Desa (Kabag Kesra) atau TOKOH Masyarakat.
5. Wakil Ketua dari unsur LPMD dan atau dari unsur tokoh masyarakat/kader DESA SIAGA yang mempunyai latar belakang pengetahuan tentang kesehatan masyarakat.
6. Sekkretaris, Bendahara, Koordinator Satuan Tugas dari unsur Karangtaruna, Bidan Desa/ Pembina wilayah Desa, tokoh masyarakat dan kader DESA SIAGA yang berasal atau perwakilan dari setiap RW.
7. Koordinator Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang harus ada minimal sebagai berikut :
8. Koordinator Satgas Peskesdes / Pelayanan kesehatan.
9. Koordinator Satgas DBD, TBC, HIV/AIDS, Surveilans dan penanggulangan Penyakit.
10. Koordinator Satgas PHBS dan KADARZI.
11. Koordinator Satgas Pengembangan Posyandu dan UKBM.
12. Koordinator Satgas Gerakan Sayang Ibu/GSI, Kegawatdaruratan Kesehatan dan Bencana.
13. Koordinator Satgas Donor Darah.
14. Koordinator Satgas Tabulin dan Dana Sehat.
15. Koordinator Satgas Lingkungan Sehat dan STBM.
16. Koordinator Satgas Pengembangan Ekonomi Produktif dan Ketahanan Pangan/Gizi.
17. Pembentukan Pengurus Forum Desa Siaga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

**BAB IV****TUGAS FORUM DESA SIAGA****Pasal 6**Tugas Forum Desa Siaga meliputi :1. Membentuk dan mengaktifkan Poskesdes.
2. Mengkoordinasikan dan Pembinaan kegiatan Surveilans.
3. Mengkoordinasikan kegiatan PHBS.
4. Mengkoordinasikan keaktifan UKBM.
5. Mengkoordinasikan kegiatan Kegawatdaruratan Kesehatan dan Bencana.
6. Mengkoordinasikan Program Lingkungan sehat.
7. Mengembangkan kegiatan Ekonomi Produktif, Ketahanan Pangan dan Gizi.
8. Menyusun Rencana Kerja yang terkait dengan masalah kesehatan.
9. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
10. Menyususn rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa siaga.
11. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan desa siaga secara rutin dan terjadwal.
12. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa siaga.
13. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan setempat.
14. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Padukuhan Siaga.
15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Forum Kecamatan Sehat.

**BAB V****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****PENGURUS FORUM DESA SIAGA****Pasal 7**1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Desa Siaga dan dalam pelaksanaan Program dilakukan oleh Ketua Forum Desa Siaga.
2. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penganggungjawab Program Desa Siaga kepada masyarakat dan atau BPD serta kepada Pembina Desa Siaga pada tingkat yang lebih tinggi.

**Pasal 8**1. Ketua Forum Desa Siaga mempunyai tugas selaku pimpinan Forum Desa Siaga dalam pelaksanaan Program Desa Siaga serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini nKetua Forum Desa Siaga mempunyai fungsi :
3. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Desa Siaga.
4. Memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga kepada Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan para Koordinator dalam Forum Desa Siaga.
5. Memfungsikan semua Forum Desa Siaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
6. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insidental sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab Desa Siaga.

**Pasal 9**1. Wakil Ketua Forum Desa Siaga mempunyai tugas membantu Ketua Forum Desa Siaga dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Forum Desa Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wakil ketua Forum Desa Siaga mempunyai fungsi :
3. Melaksanakan koordinasi terhadap para Koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaaan terhadap unit unit pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah.
7. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 10**1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil ketua berupa pelayanan administrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Forum Desa Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan.
4. Menyususn rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator.
5. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas, dan Dokumentasi serta urusa Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari Ketua dan Wakil Ketua.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
7. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasab ketua dan atau Wakil Ketua.
8. Memberikan saran atau pendapat kepada Ketua dan Wakil Ketua

**Pasal 11**1. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Forum Desa Siaga atas perintah Ketua.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
5. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

**Pasal 12**1. Koordinator dalam Forum Desa Siaga mempunyai tugas membantu dan mewakili ketua dan atau Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Koordinator dalam Forum Desa Siaga mempunyai fungsi :
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Desa Siaga serta melakukan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.

**BAB VI****TABULIN DAN DANA SEHAT****Pasal 13**1. Tabulin adalah danaa milik ibu hamil yang dipersiapkan untuk biaya persalinan.
2. Pengelolaan tabulin dikoordinir oleh kader kesehatan dan dipertanggungjawabkan kepada Forum Desa Siaga.

**Pasal 14**1. Dana sehat adalah dana bersama yang dikumpulkan warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga.
2. Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sehat kepada Forum Desa Siaga.
3. Forum Desa Siaga menggerakkan masyarakat agar mau menyisihkan sedikit penghasilannya untuk dikumpulkan dan dipergunakan sebagai biaya persalinan ibu hamil dari keluarga miskin atau ibu hamil yang terancam miskin akibat persalinan.

**BAB VII****KELOMPOK DONOR DARAH DAN AMBULAN DESA****Pasal 15**1. Kelompok donor darah adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang telah diketahui golongan darahnya dan bersedia secara sukarela sebagai pendonor darah jika sewaktu waktu dibutuhkan masyarakat.
2. Forum Desa Siaga menggerakkan masyarakat agar mau menjadi pendonor darah un tuk digunakan sebagai persiapan persalinan ibu resiko tinggi dan kepentingan kesehatan lain.

**Pasal 16**1. Ambulan Desa adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Ambulan Desa dapat berupa alat alat transportasi yang dimiliki warga di desa tersebut, seperti becak, gerobak, andong, motor, mobil dan lain sebagainya.
3. Forum Desa Siaga menggerakkan masyarakat yang memiliki alat transportasi untuk dapat digunakan sebagai ambulan desa dan menyarankan warga agar memanfaaatkan ambulan desa.

**BAB VIII****MASA BAKTI KEPENGURUSAN****Pasal 17**1. Masa bakti Kepengurusan Forum Desa Siaga adalah 3 (tiga) tahun.
2. Penggantian anggota Forum Desa Siaga berdasarkan hasil MMD.

**BAB IX****ANGGARAN DESA SIAGA****Pasal 18**Anggaran Program Desa Siaga dapat berasal dari :1. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
2. Pemerintah Desa melalui APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
3. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat RW, Dusun, sampai ke tingkat Desa.
4. Sponsor, Perusahaan Pengusaha, LSM, serta sumber dana lain yang sah.

**BAB X****PENGURUS PADUKUHAN SIAGA****Pasal 19**Pengurus padukuhan siaga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.**Pasal 21**Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada tanggal : 20 November 2015

 KEPALA DESA MELIKAN

 **KARTINA**

Diundangkan dalam Lembaran Desa Melikan Kecamatan Rongkop

Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015

 SEKRETARIS DESA MELIKAN

 **RAKIJAN**

**PERATURAN KEPALA DESA MELIKAN**

**KECAMATAN RONGKOP**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DESA SIAGA**

****

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN**

**KECAMATAN RONGKOP**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR ....../KPTS/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

**SENI BUDAYA JATHILAN**

**DI DESA MELIKAN**

**BUKU DATA PERATURAN KEPALA DESA**

**TAHUN :..............**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **PERATURAN DESA** | **TENTANG** | **URAIAN SINGKAT** | **TANGGAL DILAPORKAN** | **KETERANGAN** |
|  | **NOMOR** | **TANGGAL** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :.........../KPTS/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA JATHILAN

DI DESA MELIKAN

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan seni budaya Jathilan di Desa Melikan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk personil untuk mengelola Program / Kegiatan tersebut; |
|  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menrbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan personil Tim Pengelola Kegiatan Desa Melikan tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah; |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
|  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015; |
|  | 11. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 12. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015; |
|  | 13. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nonmor 39 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa; |
|  | 14. | Peraturan Desa Melikan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019; |
|  | 15. | Peraturan Desa Melikan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016; |
|  | 16. | Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk dan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk mengelola kegiatan/ program Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Jathilan di Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi : |
|  |  | 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa untuk memenuhi kebutuhan Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Jathilan di Desa Melikan;
 |
|  |  | 1. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar dan SHBJ;
 |
|  |  | 1. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
 |
|  |  | 1. Membuat rancangan dan menandatangani surat perjanjian;
 |
|  |  | 1. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa;
 |
|  |  | 1. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa kepada Pelaksana Teknis;
 |
|  |  | 1. Menyerahkan laporan Pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : ..........................2016

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |

Lampiran Keputusan Kepala Desa Melikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | : |  |
| Tanggal | : |  |
| Tentang | : | Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Jathilan di Desa Melikan Tahun Anggaran 2016 |

SUSUNAN TIM PENGELOLAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

SENI BUDAYA JATHILAN DI DESA MELIKAN

TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
| 1 |  |  | Ketua |
| 2 |  |  | Sekretaris |
| 3 |  |  | Anggota |

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |

Lampiran Keputusan Kepala Desa Melikan

Nomor : 27/KPTS/2016

Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa Desa Melikan TA 2016

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | INSTANSI |
| 1. | Endang Sumpeni | Ketua | Perangkat Desa |
| 2. | Subandiyana | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 3. | Sumarno | Anggota | Perangkat Desa |

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | INSTANSI |
| 1. | Kartina | Penanggungjawab | Perangkat Desa |
| 2. | Suprapto | Ketua | Perangkat Desa |
| 3. | Isdianta | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 4. | Rakijan | Anggota | Perangkat Desa |
| 5. | Sumarno | Anggota | Perangkat Desa |
| 6. | Sukijan | Anggota | Perangkat Desa |

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :17.a/KPTS/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG JALAN DESA

DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa, Desa Melikan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk personil untuk mengelola Program / Kegiatan tersebut; |
|  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menrbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan personil Tim Pengelola Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa, Desa Melikan tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah; |
|  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019; |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016; |
|  | 12. | Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk dan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk mengelola kegiatan/pr ogram Rehabilitasi/ Pemeliharaan Turap/ Talud/ Bronjong Jalan Desa, Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi : |
|  |  | 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa;
 |
|  |  | 1. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar dan SHBJ;
 |
|  |  | 1. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
 |
|  |  | 1. Membuat rancangan dan menandatangani surat perjanjian;
 |
|  |  | 1. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa;
 |
|  |  | 1. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara serah terima pekerjaan;
 |
|  |  | 1. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa;
 |
|  |  | 1. Menyerahkan laporan Pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : 13 September 2016

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |

Lampiran Keputusan Kepala Desa Melikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | : | 17.a/KPTS/2016 |
| Tentang | : | Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa, Desa Melikan Tahun Anggaran 2016 |

SUSUNAN TIM PENGELOLAN KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG JALAN DESA DESA MELIKAN

TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA | JABATAN | INSTANSI |
| 1 | SUPRAPTO | Ketua | Perangkat Desa |
| 2 | ISDIANTA | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 3 | SULARTO | Anggota | LPMD |
| 4 | GIRANTO | Anggota | LPMD |

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |



KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN

KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 32.a /KPTS/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DESA MELIKAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA MELIKAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | Bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman, Desa Melikan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk personil untuk mengelola Program / Kegiatan tersebut; |
|  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan personil Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman , Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 3. | Undang- undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah; |
|  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; |
|  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 9. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa; |
|  | 10. | Peraturan Desa Melikan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019; |
|  | 11. | Peraturan Desa Melikan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016; |
|  | 12. | Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN |
|  |
|  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | :  | Menunjuk dan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk mengelola program/ kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman, Desa Melikan Tahun Anggaran 2016; |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi : |
|  |  | 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa;
 |
|  |  | 1. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar dan SHBJ;
 |
|  |  | 1. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
 |
|  |  | 1. Membuat rancangan dan menandatangani surat perjanjian;
 |
|  |  | 1. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa;
 |
|  |  | 1. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara serah terima pekerjaan;
 |
|  |  | 1. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa;
 |
|  |  | 1. Menyerahkan laporan Pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di : Melikan

 Pada Tanggal : 25 Oktober 2016

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |

Lampiran Keputusan Kepala Desa Melikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | : | 32.a /KPTS/2016 |
| Tentang | : | Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman, Desa Melikan Tahun Anggaran 2016 |

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA MELIKAN

TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA | JABATAN | INSTANSI |
| 1 | SUPRAPTO | Ketua | Perangkat Desa |
| 2 | ISDIANTA | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 3 | AGUS SUMARNO | Anggota | Perangkat Desa |
| 4 | SUYATNO | Anggota | LPMP |
| 5 | RAKIJAN | Anggota | Perangkat Desa |

|  |
| --- |
| Kepala Desa Melikan**KARTINA** |